

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Ahmadi Miru, *et,al, Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Andreas AA Prajitno. *Hukum Fidusia*, (Malang: Selaras, 2010)
- Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*, (Bandung: Pustajka Setia, 2018)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2007)
- Bustari Muchtar. *et,al, Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Kencana dan Prenada Media Group, 2016)
- Elsi Kartika Sari, *et,al, Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: Gramedia, 2008)
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid II: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, (Jakarta: Ind- Hill Co, 2005)
- Gunawan Widjaja, *et,al, Jaminan Fidusia*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2000)
- H Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)
- H. Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021).
- Harun Badriyah, *Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan*. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2013)
- HM Arba, *Hukum Agraria Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian “Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia”*, (Alumni, Bandung, 2012)
- HR Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi: The Bankers Handbook*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005)
- I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)
- I Nyoman Mudana, *Hukum Jaminan*, (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016)
- J Satrio, *Cessie Tagihan Atas Nama*, (Jakarta: Yayasan DNC, 2009)
- J. Satrio. *Cessie Tagihan Atas Nama*, (Jakarta: Yayasan DNC, 2012)

- Johni Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Rajawali Press, 2013)
- Lexi Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Rosdakarya: Bandung, 2000)
- M. Khoidin, *Hukum Jaminan*. (Surabaya: Laksbsang Justitia, 2016)
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik, dan Praktek Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2012)
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013)
- Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013)
- Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbit UT, 2003)
- Nurwidiatmo, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*, (Jakarta: BPHN, 2011)
- Rachmad Setiawan, *et.al. Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, (Jakarta: National Legal Reform Program, 2010)
- Ridwan Khairandy. *Itikad baik Dalam Kebebasan Berkontrak Cet 1*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003)
- Riduan Syahrani, *Seluk Buluk dan Asas-Asas Hukum Perdata (Edisi Revisi)* (Bandung: Alumni, 2013)
- Rinus Pantouw, *Hak Tagih Factor Atas Piutang Dagang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- S. Meliala Djaja, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Perikatan*, (Bandung, FH.UII., 2007)
- Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*. (Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2016)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia / UI Press, 1986)
- Sri Soedewi M Sofwan. *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok - Pokok Hukum Jaminan dan Perorangan, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1980)

- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2007)
- Subekti, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan* (Yogyakarta: Liberty, 1980).
- Subekti, *et al, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Edisi Revisi, Cetakan 35* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004)
- Subekti, *Hukum Perjanjian, Cetakan 21*. (Jakarta: Intermasa, 2005)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2013)
- Totok Budisantoso, *et, al. Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 3*. (Jatim: Salemba Empat, 2014)
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif edisi pertama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012)
- Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis di Indonesia, Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019)
- W.J.S. Purwadarminta. *Kamus umum Bahasa Indonesia / susunan W.J.S. Poerwadarminta; diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999)
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008)

#### **JURNAL NASIONAL:**

- Feronika Y. Yangin. “Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUHPerdata Lex Privatum”, Vol. IV No. 5 Juni 2016, DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11407>
- Kurnia, Ichwan, *et al*, “Peralihan Hak Atas Tanah Yang Timbul Dari Perjanjian Utang Piutang”, Volume 3 No 2, November 2020, 109. DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/palrev.v3i2.7986>
- Afifah Kusumadara, “Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak Menguasai atau Hak Memiliki”, Vol 20 No.2, Desember 2013, 263. DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.v20i2.267>
- Medika Andarika Adati, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” Vol. VI No 4 Juni 2018, 10.

Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Anjak Piutang (*Factoring*) Dalam Ekonomi Islam. Volume 8 No 1 Januari – Juni 2017, 3. DOI: <https://doi.org/10.35591/wahana.v22i2.156>

Nancy Roseline Manurung. “Penerapan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Proses Pengalihan Piutang (*Cessie*) di PT Bank Tabungan Negara Pekanbaru”. Volume VI No. 2 Juli – Desember 2019.

Nur Intan Yuniarti, *et al*, “Efektivitas jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bank BRI Cabang Surakarta dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta”, Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020, 113. DOI: <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40383>

Winda Taurina Yapari. “Status Resi Gudang Dalam Hukum Jaminan Kebendaan”, Vol 2 No 2 2013, 4. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.539-562>

#### **HASIL PENELITIAN:**

Cecilia Indrawan. “Aspek Hukum Perjanjian Kredit dengan Jaminan Penanggungan Utang berupa *Personal Guarantee* (Studi kasus PT Bank Capital Indonesia, Tbk)”, Skripsi, Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2017.

Herlina. “Tinjauan Yuridis Atas Perjanjian Anjak Piutang (*Factoring*) Menurut Hukum Indonesia”, Tesis, Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2016.

HJ Sitohang. “Perlindungan Hukum Pembeli (*customer*) Dalam Perjanjian Anjak Piutang (*Factoring*) Menurut Permenkeu RI No 84/PMK.012/2006 dan Perpres RI No 9 Tahun 2009”, Tesis, Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, 2017.

Luh Kade Pebria Satyani, *et al*. “Kajian Yuridis Pengalihan Piutang dari Kreditur Kepada Perusahaan *Factoring* Dalam Perusahaan Pembiayaan Anjak Piutang”, Skripsi, Bali: Fakultas Hukum Keperdataan Universitas Udayana, 2014.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Ke-4)

Undang Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42)

Undang-undang No 9 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630)

Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358)

Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK.021/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 231)

Keputusan Presiden No 61 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53)

Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 jis. Surat Keputusan Menteri Keuangan No: 448/KMK.01/2000.

*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Hak Atas Tanah (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan).* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing). 2009.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152)

#### **PUTUSAN PENGADILAN:**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Putusan Nomor: 355/Pdt.G/2015 PN Jakarta Pusat.

Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Putusan Nomor: 203PDT/2017/PT DKI.

Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Nomor: 1797 K/Pdt/2018.

#### **WEBSITE/INTERNET:**

Badan Litbang Pertanian, “Resi Gudang: Suatu Model Pemasaran Komoditas”.  
<https://www.litbang.pertanian.go.id/info-aktual/584/> Diakses pada 8 September 2021.

DPP FERARI , “Dewan Pimpinan Pusat Federasi Advokat Republik Indonesia, Pahami Bentuk Bentuk Wanprestasi atau Ingkar Janji, 2020”,  
<http://www.dppferari.org/pahami-bentuk-bentuk-wanprestasi-atau-ingkar-janji/> Diakses pada 20 Oktober 2021.

Mutia Fauzia, “Pengertian Gadai dan Dasar Hukum Gadai di Indonesia”  
<https://money.kompas.com/read/2021/06/12/170319726/pengertian-gadai-dan-dasar-hukum-gadai-di-indonesia> Diakses pada 5 Oktober 2021.

Mieke Laila Dini. Mengenal Hipotik dalam Hukum Jaminan  
<https://www.kompasiana.com/sutini/5b31aba4bde57565d549dd05/mengenal-hipotik-dalam-hukum-jaminan>. Diakses pada 10 November 2021.

Pertanian. 12 Mei 2008, [www.litbang.deptan.go.id/berita/one/584/](http://www.litbang.deptan.go.id/berita/one/584/) Diakses pada 9 Oktober 2021

PRS. Konsep Dasar Hukum Jaminan.  
<http://menuruthukum.com/2020/04/23/konsepdasarhukum-jaminan/>  
Diakses pada 4 Oktober 2021.

#### **KAMUS:**

Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kelalaian> Diakses pada 21 November 2021.

#### **WAWANCARA:**

Hasil wawancara dengan Bapak Suraji, S.H, Ketua Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pandeglang, Kantor BPN Kota Pandeglang, Pandeglang, Tanggal 11 Oktober 2021, Pukul 15.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Dr. Beatrix Benni, S.H., M.Kn., M.Pd., Seorang Notaris dan Dosen Universitas Andalas Kota Padang, *zoom online*, Tanggal 6 Desember 2021 Pukul 19.00 WIB.